EDISI KAMIS, 09 OKTOBER 2025

HARIAN

LENTERA

Inspirasi Perubahan

03 POLITIC
Sebanyak 3,9 Juta Nelayan Miskin Ekstrem, Program KNMP Bisa Jadi Solusi

05 NUSANTARA
Kala Booming Pekerja Serabutan RI Disorot Bank Dunia

10 LISTSTYLE
Cara Cerdas Agar Gaji Tak Numpang Lewat

MENKEU BAKAL KUCURKAN RP20 T KE BANK JAKARTA DAN BANK JATIM, TEPATKAH?

Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, kembali akan bagi-bagi uang ke bank. Setelah sebelumnya mencairkan Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kini Menkeu akan menaruh uang di bank milik pemerintah daerah, yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. atau yang lebih dikenal dengan nama Bank Jatim dan PT Bank DKI atau Bank Jakarta, Selasa (9/10/2025). Menkeu mengatakan dana yang ditempatkan ke dua bank daerah itu merupakan saldo anggaran lebih (SAL), di mana Purbaya mengaku masih ada Rp 275 triliun. Purbaya memperkirakan akan menyetor Rp10 triliun hingga Rp20 triliun kepada dua Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut. Namun, Menkeu mengatakan belum menentukan nominal pasti penempatan dana menganggur pemerintah Bank Jakarta dan Bank Jatim. Dia hanya melihat dua bank itu siapnya berapa. Purbaya mengharapkan dua bank daerah itu mampu melakukan penyerapan anggaran tersebut secara cepat. Dengan demikian akan mampu memacu roda perekonomian masyarakat. Namun, apakah pencairan anggaran ini bisa memberikan dampak positif pada masyarakat. Selain itu, kalangan pengamat juga tidak sepenuhnya menilai langkah tersebut sebagai kebijakan yang tepat, sehingga perlu ada kehati-hatian.

BACA HAL 11...

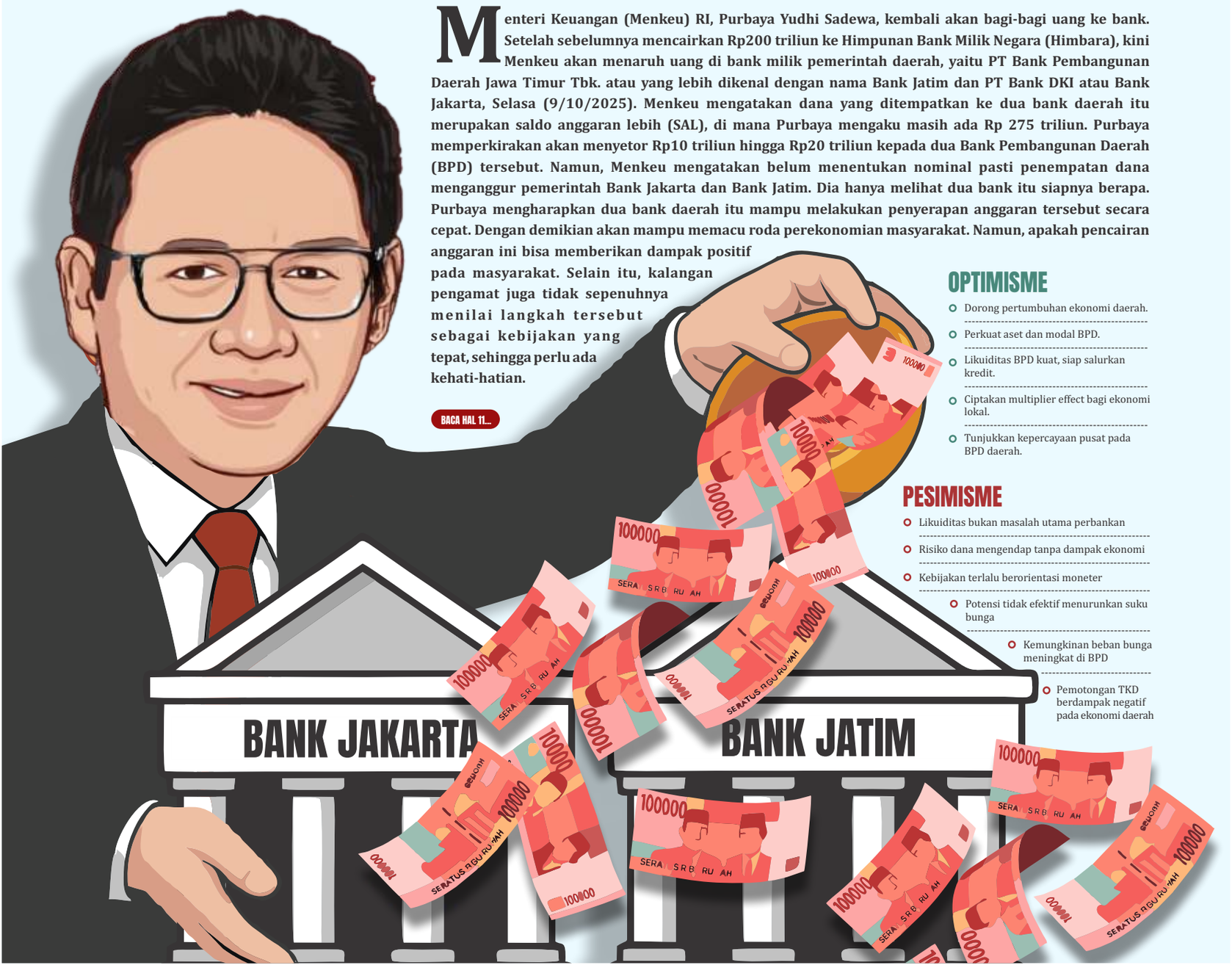

OPTIMISME

- Dorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- Perkuat aset dan modal BPD.
- Likuiditas BPD kuat, siap salurkan kredit.
- Ciptakan multiplier effect bagi ekonomi lokal.
- Tunjukkan kepercayaan pusat pada BPD daerah.

PESIMISME

- Likuiditas bukan masalah utama perbankan
- Risiko dana mengendap tanpa dampak ekonomi
- Kebijakan terlalu berorientasi moneter
- Potensi tidak efektif menurunkan suku bunga
- Kemungkinan beban bunga meningkat di BPD
- Pemotongan TKD berdampak negatif pada ekonomi daerah

PRESIDEN LANTIK 25 PEJABAT DAN 10 DUBES

Presiden Prabowo Subianto melantik 25 nama pejabat negara dan 10 Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk sejumlah negara sahabat. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (8/10/2025).

Presiden Prabowo melantik pejabat baru hari ini. (detikcom)

Pelantikan tersebut meliputi Mathius Fakhiri, Gubernur Papua; Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, Wagub Papua. Kemudian juga dua wakil menteri yaitu Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ahmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benyamin Paulus Octavianus.

Kemudian di lingkung Badan Pengaturan (BP) BUMN yaitu Kepala BP BUMN, Dony Oskaria; Wakil Kepala BP BUMN, Aminudin Ma'ruf; dan Wakil Kepala BP BUMN. Teddy Barata.

Selain itu Presiden juga melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yaitu Velix Vernando Wanggai sebagai Ketua; John Wempi Wetipo; Ignatius Yogo Triyono; Paulus Waterpauw; Ribka Haluk; Ali Hamdan Bogra; Gracia Josaphat Jobel Mambrasar; Yani; John Gluba Gepze; dan Johnson Estrella Sihasale.

Setelah itu ada Anggota Dewan Komisioner LPS yaitu Anggito Abimanyu, Ketua LPS merangkap anggota; Farid Azhar Nasution, Wakil Ketua LPS merangkap anggota; Doddy Zulverdi; Ferdinan Dwikaroja Purba; Suminto; dan Aida S Budiman.

Ada juga Asisten Khusus Presiden yaitu Dirgayuza Setiawan sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, dan Agung Gumilar Saputra dilantik sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis.

Untuk lingkup duta besar (Dubes) ada Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo, Dubes RI untuk Malaysia; Hotmangaradja Pandjaitan yang juga Dubes RI untuk Singapura; Kuncoro Giri Waseso, Dubes RI untuk Mesir; Syahda Guruh Langkah Samudera, Dubes RI untuk Qatar (Doha).

Kemudian ada Berlian Helmy sebagai dubes RI untuk Azerbaijan; Andy Rachmianto, Dubes RI untuk Belgia (Brussel); merangkap Luksemburg dan Uni Eropa; Listyowati – Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal; Adam Mulawarman Tugio, Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi); Laurentius Amrih Jinangkung, Dubes RI, untuk Belanda (Den Haag); Lukman Hakim Siregar, Dubes RI untuk Suriah berkedudukan di Damaskus. Wakil Dubes RI ada Irene, Wakil Duta Besar untuk Perwakilan RI di Beijing, China.

Terkait dengan pelantikan para pejabat tersebut, Istana Kepresidenan mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto melantik wakil menteri kesehatan baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan tugas di Kementerian Kesehatan cukup berat dan besar sehingga membutuhkan wakil menteri tambahan. “Termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu wakil menteri di Kementerian Kesehatan,” kata dia usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 8 Oktober 2025.

Presiden Prabowo melantik Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Maka, Kemenkes kini memiliki dua wakil menteri. Wakil Menteri Kesehatan yang lain adalah Dante Saksono Harbuwono.

Berkaitan dengan BGN, Kemenkes akan memasok data soal kasus keracunan makan bergizi gratis kepada Badan Gizi Nasional. Sebab, pemerintah akan melaporkan kasus keracunan MBG secara berkala seperti era Covid-19. “Sudah ada datanya, sudah kita share kepada Badan Gizi Nasional,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Rabu.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan membagi tugas tiga wakil menterinya berdasarkan pembagian zona waktu Indonesia.

"Bagus. Dengan penugasan oleh bapak presiden, ke kemendagri, ada 3 berarti wamen, saya tinggal bagi saja nanti. negara Indonesia kan luas sekali ya. Bayangkan negara kita kepulauan terbesar. Negara kepulauan terbesar seluruh dunia," jelas Tito dikutip Rabu (8/10/2025).

Tito menjelaskan, pembagian kerja akan disesuaikan dengan wilayah barat, tengah, dan timur. Wamendagri pertama akan menangani Jawa dan Sumatera, yang kedua bertanggung jawab atas Kalimantan dan Sulawesi, sedangkan satu lainnya akan fokus di wilayah Maluku, Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara.

"Jadi saya tinggal bagi tugas saja nanti 3 wamen, ada nanti yang koordinator bagian barat, bagian tengah dan bagian timur," tutur Tito.

> **Termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu wakil menteri di Kementerian Kesehatan,”**
>
> **Prasetyo Hadi**
> **Menteri Sekretaris Negara**

Tito mengatakan, ketiga wakilnya akan diberi mandat untuk turun langsung ke daerah, terutama wilayah yang menghadapi persoalan serius seperti inflasi tinggi, kemiskinan, dan ketimpangan pembangunan. Ia menilai pendekatan langsung di lapangan penting untuk memastikan kebijakan pusat berjalan efektif.

"Mereka nanti akan saya tugaskan untuk berkunjung mendatangi daerah daerah itu, yang misalnya inflasinya tinggi, yang kemiskinannya tinggi, yang punya problema, yang saya enggak akan mungkin sempat kalau sendirian," jelas Tito.

Ia menambahkan, kehadiran tiga wakil menteri justru membuat koordinasi Kemendagri semakin efisien mengingat luasnya cakupan wilayah pemerintahan.

"Jadi saya tinggal bagi tugas saja nanti 3 wamen, ada nanti yang koordinator bagian barat, bagian tengah dan bagian timur," tutur Tito. (han,ist,ant/lut)

SEBANYAK 3,9 JUTA NELAYAN MISKIN EKSTREM, PROGRAM KNMP BISA JADI SOLUSI

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut pada 2022 kemiskinan di daerah pesisir mencapai 17,74 jiwa dan sebanyak 3,9 juta jiwa masuk kategori miskin ekstrem. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Rina Sa'adah minta kelompok ini harus menjadi sasaran utama Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Rina Sa'adah.

Dia mengatakan bahwa KNMP dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar meningkat kesejahteraannya dan terbebas dari kemiskinan. Rina mengatakan sebagian besar kelompok miskin di wilayah pesisir merupakan para nelayan.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jumlah nelayan pada 2023 sebanyak 2,4 juta jiwa. Sebanyak 85 persen adalah nelayan kecil. Oleh sebab itu Rina meminta program KNMP harus sesuai dengan kebutuhan nelayan miskin tersebut.

"Berdasarkan paparan KKP pada tahun 2025 dibangun 65 lokasi, dan tahun 2026 sebanyak 250 lokasi. Kami berharap anggaran yang cukup besar ini dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik untuk benar-benar menyejahterakan nelayan," papar legislator asal Dapil Jawa Barat X ini Rabu (8/10/2025).

Rina menambahkan, tekanan hidup nelayan yang berada di wilayah pesisir semakin berat dengan adanya perubahan iklim. Selain itu ketergantungan pada mata pencaharian mencari ikan di laut, keterbatasan modal sehingga terlilit hutang kepada tengkulak, kemampuan mengolah hasil laut yang rendah serta ketersediaan infrastruktur dan keterbatasan akses pasar menjadikan nelayan tidak mampu menjadi aktor utama dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan ditanah air.

"Program KNMP perlu diiringi dengan intervensi kebijakan yang berpihak kepada nelayan miskin agar bisa memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan guna memenuhi kebutuhan pokok kehidupan serta meningkatkan kesejahteraan. Kementerian KKP juga perlu mendengar berbagai keluhan nelayan," ujar Rina.

Sebagaimana diungkapkan saat diterima audiensi dengan Fraksi PKB DPR RI, para nelayan membutuhkan berbagi bantuan untuk melaut seperti kemudahan mendapatkan solar untuk perahu motor, bantuan peralatan penangkapan ikan, es balok untuk menjaga kesegaran ikan. Selain itu, para nelayan juga membutuhkan bantuan modal kerja, jaminan harga pasar yang stabil, cold storage serta pendampingan hilirisasi produk kelautan dan perikanan.

Sebagai negara kepulauan dan bangsa bahari yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia sepanjang 108.000 kilometer, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah.

Berdasarkan paparan KKP, pada 2026 produksi perikanan ditargetkan mencapai 25,84 juta ton, nilai ekspor hasil perikanan mencapai USD 6,7 miliar dan pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK) sekitar 4 - 6 persen. "Tantangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah menjadikan nelayan aktor utama dan menikmati kesejahteraan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan," pungkas Rina.

Program KNMP telah menyasar berbagai daerah. Bahkan di Provinsi Lampung, program KNMP dapat meningkatkan pengelolaan sektor perikanan di daerah dari hilir sampai ke hulu. "Potensi di Lampung adalah sektor perikanan yang banyak dihasilkan dari perikanan tangkap kemudian ada potensi perikanan budidaya. Jadi dengan dibangunnya Kampung Nelayan Merah Putih ini akan ada peningkatan pendapatan bagi nelayan di daerah," ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Liza Derni di Bandarlampung, Rabu (8/10/2025) dilansir antara.

Ia mengatakan selama ini sektor perikanan di daerah pengelolaannya dilakukan secara mandiri per kabupaten dan kota. "Di dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pengelolaannya dilakukan dari hulu sampai hilir secara terintegrasi. Pengelolaan yang terintegrasi tersebut akan meningkatkan pengelolaan potensi perikanan yang melimpah di Lampung sebagai daerah pesisir," katanya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan bahwa program KNMP bukan hanya membangun sarana prasana, tetapi bagaimana mengubah wajah kampung nelayan yang selama ini dikenal sebagai kantong-kantong kemiskinan menjadi lebih produktif, modern, dan berdaya saing.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan akan mengawasi pelaksanaan program prioritas KNMP dengan ketat. Sebagai salah satu bentuk pengawasan, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP melakukan pemantauan di lokasi untuk Mutual Check Awal (MC-0), guna memastikan kesesuaian antara rencana teknis atau gambar kerja dengan kondisi aktual di lapangan sebelum konstruksi dimulai.

Itjen KKP juga memantau setiap tahapan pelaksanaan program KNMP, termasuk meninjau setiap usulan pembayaran pekerjaan. "Kami tidak ingin program-program ini nantinya menemui berbagai masalah yang dapat merugikan negara dan rakyat," kata Inspektur Jenderal KKP Ade Tajudin Sutiawarman dalam keterangan resmi, Senin (6/10/2025) dilansir tempo.

Ia menjelaskan peninjauan atau review pembayaran pekerjaan dilakukan minimal dua kali di setiap lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Menurut dia, pelaksanaannya bukan hal yang mudah, perlu sumber daya auditor yang mumpuni dan dikombinasikan dengan metode pengawasan jarak jauh yang optimal.

"Di tahap awal, kami juga ikut mendampingi survei pada calon penyedia sarana dan prasarana hilir KNMP," kata Ade.

Ia menambahkan, percepatan pelaksanaan program strategis juga perlu memperhatikan aspek administratif. Selain itu, perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan seluruh peraturan terkait, serta perbaikan tata kelola termasuk penyiapan regulasi untuk setiap kebijakan baru yang dibuat.

Pengawasan program prioritas ini juga melibatkan kolaborasi pengawas eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun aparat penegak hukum. Hal ini, menurut Ade, bertujuan untuk saling mengingatkan dan mengidentifikasi potensi risiko. "Sehingga akan meminimalisasi atau bahkan menghilangkan risiko atau masalah yang signifikan," ujar dia.

Program ini dinilai sebagai langkah konkret pemerintah pusat untuk memajukan wilayah pesisir Indonesia. KKP sebelumnya telah mengumumkan 65 lokasi pembangunan tahap pertama program Kampung Nelayan Merah Putih.(rls,ist,ant/lut)

> **Berdasarkan paparan KKP pada tahun 2025 dibangun 65 lokasi, dan tahun 2026 sebanyak 250 lokasi. Kami berharap anggaran yang cukup besar ini dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik untuk benar-benar menyejahterakan nelayan,"**
>
> ---
>
> **Rina Sa'ada**
>
> Anggota Komisi IV DPR RI
> Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan

RENTETAN BENCANA JELANG LA NINA

Sejumlah daerah di Indonesia dilanda cuaca ekstrem dalam sepekan terakhir. Fenomena ini terjadi di tengah peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi munculnya La Niña pada akhir tahun 2025, yang diperkirakan akan meningkatkan curah hujan di berbagai wilayah Nusantara.

(Ilustrasi) Warga menggunakan payung dan jas hujan saat hujan di pedestrian Jalan Sudirman, Jakarta, Sabtu (25/1/2025). (Dok.ANT)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, hingga Rabu (8/10/2025) pukul 07.00 WIB, terdapat sedikitnya tiga kejadian bencana akibat cuaca ekstrem yang berdampak cukup signifikan di sejumlah daerah.

Di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, hujan deras disertai angin kencang menerjang tiga kecamatan—Bajeng, Pallangga, dan Bontomarannu—pada Senin (6/10/2025) sore. Sebanyak 265 kepala keluarga terdampak, dengan 265 unit rumah rusak dan dua fasilitas umum turut mengalami kerusakan. Tim gabungan dari BPBD Gowa telah melakukan pembersihan material dan menyalurkan bantuan dasar bagi warga yang terdampak.

Cuaca ekstrem serupa juga melanda Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Minggu (5/10/2025). Angin kencang disertai hujan mengguncang Desa Kalipenggung dan Desa Tunjung, Kecamatan Randuagung. Sebanyak 39 jiwa terdampak dan 37 rumah rusak ringan serta dua rusak sedang akibat pohon tumbang. BPBD Lumajang telah melakukan kaji cepat dan perbaikan rumah warga. Aktivitas masyarakat kini berangsur normal setelah pembersihan material rampung.

Sementara itu di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, angin kencang menghantam Desa Maitan, Kecamatan Tambakromo, pada Senin (6/10) sore. Akibatnya, 55 rumah warga rusak, satu fasilitas pendidikan terdampak, serta dua kandang ternak roboh. BPBD Pati bersama aparat desa telah menyelesaikan pendataan dan pembersihan puing-puing rumah yang rusak.

BMKG dalam laporan terbarunya bertajuk Prediksi Musim Hujan 2025/2026 menyebutkan, La Niña berpotensi muncul di akhir tahun. Meski sebagian besar model iklim global masih menunjukkan kondisi ENSO netral, beberapa model memprediksi kemunculan La Niña lemah menjelang penutupan tahun 2025.

Kepala BMKG menjelaskan, kemunculan La Niña diperkirakan akan bersamaan dengan fase negatif Indian Ocean Dipole (IOD) yang bertahan hingga November 2025. Kombinasi kedua fenomena ini berpotensi meningkatkan intensitas hujan lebat di banyak wilayah Indonesia.

BMKG juga memprediksi awal musim hujan berlangsung bertahap antara September hingga November 2025, dengan puncaknya terjadi pada November–Desember 2025 di wilayah barat dan Januari–Februari 2026 di wilayah selatan serta timur Indonesia.

Imbauan Kesiapsiagaan

Menanggapi meningkatnya intensitas cuaca ekstrem menjelang datangnya La Niña, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan. "Warga diharapkan berhati-hati beraktivitas di luar ruang saat hujan lebat, menghindari area rawan longsor atau pohon tumbang, dan terus memantau informasi cuaca resmi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (8/10/2025).

BNPB juga meminta pemda memperkuat sistem peringatan dini dan memastikan kesiapan sarana penanggulangan bencana di wilayah masing-masing.

BMKG memperkirakan durasi musim hujan tahun ini akan lebih panjang dari biasanya, meski secara umum bersifat normal. Artinya, curah hujan tidak akan jauh di atas rata-rata, namun dengan frekuensi hujan yang lebih sering dan merata di banyak wilayah.

Dengan potensi banjir, longsor, dan angin puting beliung yang lebih tinggi, sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga penanggulangan bencana menjadi kunci utama menghadapi musim basah yang kini mulai terasa dampaknya.(wid,rls,ant/dya)

PERBEDAAN LA NIÑA DAN EL NIÑO

- **ASAL DAN ARTI NAMA**
  - **El Niño** berarti "anak laki-laki" dalam bahasa Spanyol, mengacu pada air laut hangat yang muncul di Samudra Pasifik bagian timur pada masa Natal.
  - **La Niña** berarti "gadis kecil", menggambarkan kondisi kebalikan dari El Niño, yaitu ketika air laut menjadi lebih dingin dari normalnya.
- **PENYEBAB UTAMA**
  - **El Niño:** Terjadi karena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur.
  - La Niña: Terjadi karena pendinginan suhu permukaan laut di wilayah yang sama.
- **DAMPAK TERHADAP INDONESIA**
  - **El Niño:** Hujan turun drastis, risiko kekeringan, kebakaran hutan, krisis air, dan penurunan produksi pangan.
  - **La Niña:** Hujan meningkat, potensi banjir, longsor, dan angin kencang, tapi bisa dimanfaatkan untuk ketahanan air, energi, dan pertanian jika dimitigasi dengan baik.

Awal Musim Hujan Tak Serentak

AWAL musim hujan tidak serentak di seluruh negeri. Sebanyak 333 ZOM (47,6%) diprediksi memasuki musim hujan pada September-November 2025, dengan sebagian Sumatra dan Kalimantan sudah basah sebelum September.

Puncaknya jatuh pada November-Desember 2025 di Indonesia barat, dan Januari-Februari 2026 di selatan serta timur—sama atau lebih awal dari normal.

Wilayah seperti Jawa dan Bali berpotensi curah hujan tinggi, sementara musim hujan meluas bertahap ke selatan dan timur.

BMKG menyarankan petani memanfaatkan prediksi curah hujan 10 harian hingga enam bulanan untuk pola tanam optimal.

La Nina ini berpotensi tambah curah hujan hingga 20-40 persen, mirip pola 2024 yang berlangsung hingga April 2025.

Masyarakat diimbau waspada banjir, longsor, dan genangan, terutama di daerah rawan.BMKG tekankan layanan peringatan dini melalui aplikasi dan situs resminya untuk mitigasi dini.

Prediksi ini jadi pengingat adaptasi perubahan iklim, dengan BMKG siap update bulanan. Pemerintah pusat dan daerah diminta koordinasi ketat untuk lindungi masyarakat.

BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem yang berlaku selama 8 hingga 10 Oktober 2025. Dalam periode tersebut, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan lebat, angin kencang, serta bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor yang bisa terjadi di sejumlah wilayah.

Peringatan ini disampaikan BMKG melalui akun resmi @InfoBMKG, Rabu (8/10/2025).

Lembaga tersebut menegaskan bahwa cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di berbagai daerah dengan intensitas yang berbeda setiap harinya.

Pada Rabu, 8 Oktober 2025, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Sementara itu, wilayah dengan tingkat kewaspadaan Siaga mencakup Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua, dan Papua Selatan, dengan potensi hujan lebat hingga sangat lebat. BMKG juga memperingatkan adanya potensi angin kencang di beberapa wilayah seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan.(wid,rka/dya)

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan

KALA BOOMING PEKERJA SERABUTAN RI DISOROT BANK DUNIA

Bank Dunia menyoroti fenomena boomingnya jumlah pekerja informal di Indonesia, di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Laporan terbaru lembaga keuangan dunia itu menyebut lonjakan pekerja sektor informal atau "gig economy" menjadi tanda semakin berkurangnya lapangan kerja berkualitas di kawasan Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo, mengatakan selama satu dekade terakhir terjadi pergeseran besar dalam struktur ketenagakerjaan di kawasan. Pekerja yang sebelumnya beralih dari sektor pertanian ke industri berproduktivitas tinggi, kini justru banyak berpindah ke sektor jasa informal yang berproduktivitas rendah.

"Banyak orang meninggalkan sektor pertanian berproduktivitas rendah, bukan menuju industri berproduktivitas tinggi, melainkan ke pekerjaan berproduktivitas rendah di sektor jasa, termasuk gig economy," ujar Aaditya dalam konferensi pers World Bank East Asia and the Pacific Economic Update edisi Oktober 2025, dikutip Rabu (8/10/2025).

Indonesia disebut menjadi contoh nyata dari fenomena ini. Menurut Mattoo, peningkatan besar pekerja informal terjadi di sektor jasa, yang mencerminkan menurunnya daya serap sektor industri dan manufaktur terhadap tenaga kerja baru.

Bank Dunia menilai lonjakan tenaga kerja informal berisiko memperlemah daya saing ekonomi sekaligus memperbesar kerentanan kelas menengah. Banyak pekerja informal hidup tanpa perlindungan sosial dan pendapatan tetap, sehingga mudah terjebak kembali dalam kemiskinan ketika terjadi guncangan ekonomi.

"Kelompok masyarakat yang rentan jatuh miskin kini lebih besar daripada kelas menengah di sebagian besar negara," tulis laporan tersebut.

Diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hingga Februari 2025 jumlah tenaga kerja informal mencapai 86,56 juta orang, atau 59,40% dari total penduduk bekerja. Sementara itu, pekerja formal hanya berjumlah 59,19 juta orang atau 40,60%.

Dibandingkan periode Februari 2024, proporsi pekerja informal justru naik 0,23 poin persentase, sedangkan pekerja formal turun dengan angka yang sama.Kondisi ini menunjukkan dominasi sektor informal di pasar tenaga kerja Indonesia masih kuat, bahkan meningkat, di tengah upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja formal.

Antusiasme pencari kerja memadati Job Fair di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Senin, (19/5/2025).(fok.cnbc)

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa satu dari tujuh anak muda di Indonesia dan China masih menganggur. Tingkat pengangguran kelompok usia 15–24 tahun di Indonesia mendekati 15%, sementara di China angkanya telah melampaui 15%. Kondisi ini menunjukkan sulitnya kaum muda menembus pasar kerja di tengah dinamika ekonomi yang berubah cepat.

Bank Dunia mencatat bahwa banyak tenaga kerja di kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) masih bergantung pada sektor informal yang tidak selalu memberikan penghasilan layak. Selain itu, otomatisasi dan digitalisasi melalui robot industri serta kecerdasan buatan memang meningkatkan produktivitas, tetapi juga menggantikan sejumlah jenis pekerjaan lama.

Meski tingkat penyerapan tenaga kerja di kawasan EAP tergolong tinggi secara keseluruhan, partisipasi angkatan kerja masih bervariasi antarnegara. Di beberapa negara Pasifik dan kelompok perempuan, tingkat partisipasi tetap rendah. (wid,rls,ant/dya)

PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

- **Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia**
  Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 4,8% pada 2025, selevel dengan Tiongkok dan Kamboja; kawasan diperkirakan melambat ke 4,3% pada 2026.
- **Paradoks pertumbuhan & penciptaan lapangan kerja**
  Pertumbuhan belum sejalan dengan penciptaan pekerjaan berkualitas; dominan di sektor jasa informal, partisipasi perempuan dan anak muda masih rendah.
- **Konteks eksternal & risiko global**
  Proteksionisme, ketidakpastian ekonomi dunia, dan volatilitas pasar menekan stabilitas makro Indonesia.
- **Implikasi kemiskinan dan kerentanan**
  Meski banyak keluar dari kemiskinan, kerentanan tetap tinggi; tantangan utama adalah memperkuat jaring pengaman sosial agar masyarakat tak kembali miskin.

Prediksi Indonesia Tumbuh 4,8%, Ekonom: Lebih Realistis

EKONOM Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menyebut prediksi Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 4,8 persen tahun ini dinilai realistis.

"Saya cenderung melihat proyeksi World Bank dan IMF lebih realistis daripada proyeksi Pemerintah, dimana 2025 ekonomi akan tumbuh di bawah 5%," ujar Wijayanto kepada inilah.com, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Diketahui, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 5,3 persen.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti dorongan Pemerintah yang mengeluarkan paket stimulus ekonomi di kuartal IV. Dia menilai langkah tersebut tak akan membantu pertumbuhan ekonomi naik signifikan.

"Stimulus ekonomi akan membantu, tetapi tidak terlalu signifikan mengingat nilai yang relatif kecil, yaitu Rp 16 triliun saja," kata dia.

Meskipun begitu, dia optimistis di tahun depan angka pertumbuhan ekonomi akan naik. "Tetapi untuk 2026 saya yakin bisa mencapai 5% atau sedikit lebih tinggi," jelasnya.

Sebelumnya, Bank Dunia (World Bank) memberikan laporan terbaru yang bertajuk East Asia and the Pacific Economic Update edisi Oktober 2025. Dalam laporan tersebut, World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,8% pada 2025.

Pertumbuhan itu lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya 4,7%, namun masih di bawah target pemerintah yang mencapai 5,3%.

Sementara itu, pada 2026 World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di level 4,8%.

"Perlambatan (ekonomi) di belahan dunia lain memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap negara-negara berkembang di Kawasan Asia Timur dan Pasifik," demikian seperti dikutip dari laporan tersebut, Rabu (8/10/2025).

Bank Dunia menekankan bahwa fokus perbaikan ekonomi Indonesia seharusnya lebih kepada efisiensi dan prioritas belanja pemerintah, daripada hanya sekadar mengecilkan angka defisit itu sendiri.

Pengelolaan pengeluaran yang lebih baik dinilai dapat menciptakan dampak positif jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal Indonesia, sekaligus mengantisipasi tantangan eksternal yang terus muncul.

"Di Indonesia, permasalahannya lebih pada arah pengeluaran pemerintah daripada besarnya defisit yang diperkirakan akan tetap berada dalam aturan fiskal negara. Misalnya fokus saat ini adalah subsidi untuk sektor pangan, transportasi dan energi, serta investasi yang diarahkan untuk mendorong permintaan agregat," tuturnya. (wid,ist,rls/dya)

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan

Hanya Satu SPPG di Kabupaten Malang Kantongi Sertifikasi Laik Higiene

Ilustrasi: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Abd Saleh Kabupaten Malang menyiapkan porsi Makanan Bergizi Gratis (MBG). (dok.ist/inst:lanudabdsaleh)

MALANG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang mencatat, hingga kini hanya satu yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dari total 70 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemkab pun akan mengebut sertifikat bagi fasilitas pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinkes Kabupaten Malang, Gunawan Djoko Untoro, menyampaikan satu-satunya SPPG yang telah mengantongi SLHS berada di Tamanharjo, Kecamatan Singosari, yang dikelola oleh TNI AU atau Lanud Abdulrachman Saleh.

"Kami baru mengeluarkan satu SLHS di SPPG Tamanharjo Singosari," ujarnya, dikutip pada Rabu (8/10/2025).

Gunawan, yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Malang, ini menjelaskan pihaknya tengah melakukan percepatan penerbitan SLHS bagi seluruh SPPG.

Langkah tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Nomor HK.02.02/C/3191/2024 tentang Dukungan Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Keamanan Pangan Olahan Siap Saji pada Program MBG.

Serta Surat Edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12/05/01/SB.12/09.2025 yang menginstruksikan daerah untuk segera mengurus penerbitan SLHS.

"Sudah mulai Sabtu (4/10/2025) kemarin kami melakukan percepatan pelatihan bagi penjamah makanan sebagai salah satu syarat pengajuan SLHS. Untuk percepatan ini, Dinas Kesehatan diberi kewenangan menerbitkan SLHS tanpa melalui aplikasi OSS dinas perizinan," kata Gunawan.

Menurutnya, sejumlah pengelola SPPG telah mengajukan permohonan penerbitan SLHS ke Dinkes Kabupaten Malang. Pihaknya pun berkomitmen memfasilitasi pelatihan bagi tenaga penjamah makanan yang diselenggarakan oleh masing-masing SPPG.

"Kami membantu menyediakan narasumber, menerbitkan sertifikat penjamah makanan, serta mengeluarkan SLHS jika seluruh persyaratan sudah terpenuhi," jelasnya.

Gunawan menambahkan, pelatihan penjamah makanan menjadi bagian penting dari proses sertifikasi. Karena hal itu berkaitan langsung dengan keamanan pangan yang dihasilkan. Saat ini, Dinkes tengah memfasilitasi kegiatan tersebut bagi para pekerja SPPG agar seluruh dapur program MBG dapat segera memenuhi standar laik higiene.

Dikatakannya, sejumlah persyaratan khusus percepatan penerbitan SLHS bagi SPPG, di antaranya SPPG harus memiliki surat izin operasional dari BGN, denah tata letak dapur, serta minimal 50 persen tenaga penjamah makanan yang telah memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji.

"Selain itu, setiap SPPG wajib menyertakan hasil uji laboratorium terhadap air bersih dan makanan yang memenuhi parameter mikrobiologi serta kimia terbatas," katanya.

Persyaratan lain yang harus dipenuhi, lanjut Gunawan, yakni mencakup hasil uji kebersihan alat makan (swab test), pemeriksaan kesehatan penjamah makanan, serta hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dengan nilai minimal 80. "Semua komponen ini menjadi indikator kelayakan higiene dan sanitasi dapur dalam mendukung program MBG," tuturnya.

Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, mengonfirmasi hingga akhir September 2025 telah berdiri 70 SPPG di wilayah setempat. (Santi/Dya)

Dua Toko di Kota Malang Terancam Denda Puluhan Juta Buntut Salahi Izin dan Jual Minol

MALANG - Dua toko di wilayah Muharto, Kota Malang, terancam sanksi denda puluhan juta rupiah setelah Satpol PP menemukan sejumlah pelanggaran dalam kegiatan usahanya. Selain beroperasi dengan izin yang tidak sesuai peruntukan, kedua toko itu juga kedapatan menjual minuman beralkohol kepada anak di bawah umur.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (PPUD) Satpol PP Kota Malang, Denny Surya Wardhana, mengatakan penindakan dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di wilayah tersebut.

"Kemarin kami, Satpol PP bersama PPNS langsung melakukan operasi di lokasi. Ada dua toko yang kami datangi, yaitu toko Girun dan warung toko Mandiri Jaya. Keduanya berlokasi di Muharto," ujar Denny, Rabu (8/10/2025).

Dijelaskannya, hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Pelanggaran itu mencakup penjualan minuman beralkohol tanpa Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), serta adanya indikasi penjualan kepada anak-anak di bawah usia 21 tahun.

Denny menegaskan, kedua toko tersebut kini sedang dalam proses penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh petugas PPNS Satpol PP Kota Malang. Termasuk di dalamnya penyitaan sejumlah barang bukti yang ditemukan saat operasi.

Sebagai tindak lanjut, Satpol PP akan membawa kasus ini ke sidang tindak pidana ringan (tipiring). Ancaman sanksi terhadap pelaku, sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2020, yakni pidana kurungan maksimal tiga bulan dan denda paling banyak Rp50 juta.

"Keputusan soal denda atau hukuman akan ditentukan oleh hakim pengadilan," tegasnya.

Sidak Satpol PP Kota Malang ke salah satu toko penjual minol di wilayah Muharto. (dok. Satpol PP Kota Malang)

Sementara itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Malang, Murni Setyowati, mengatakan salah satu pelaku usaha yang diperiksa diketahui memiliki izin usaha yang tidak sesuai peruntukan.

"Itu sebenarnya kios, izinnya membuka usaha toko biasa, bukan untuk menjual minol. Selain itu, alamat izin usaha juga berbeda. Di dokumen tertulis di Jalan Muharto Gang 7, sedangkan lokasi usahanya berada di tepi jalan raya Muharto, jadi tidak ada nomor tempat usahanya," terang Murni.

"Kami menerima pengaduan dari warga yang merasa resah karena ada pelaku usaha menjual minol tanpa izin. Setelah dicek di lapangan, ternyata benar bahwa toko tersebut tidak memiliki izin yang sesuai," imbuhnya. (Santi/Dya)

PM ITALIA DILAPORKAN KE ICC TERKAIT GENOSIDA GAZA

Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, mengungkapkan bahwa dirinya telah dilaporkan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan keterlibatan dalam genosida yang dilakukan Israel di Jalur Gaza. Beberapa menteri Italia juga menghadapi tuduhan serupa.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni tiba pada hari KTT Komunitas Politik Eropa di Kopenhagen, Denmark, Kamis, (2/10/2025). (Foto: Reuters)

Dikutip dari AFP pada Rabu (8/10/2025), Meloni menyampaikan bahwa namanya tercantum dalam sebuah laporan yang diajukan oleh kelompok advokasi Palestina. Laporan tersebut menuduh dirinya dan sejumlah menteri Italia terlibat dalam penyediaan persenjataan untuk Israel.

Meloni menyatakan bahwa aduan ke ICC tersebut juga menyoroti Menteri Pertahanan Guido Crosetto dan Menteri Luar Negeri Antonio Tajani. Ia menduga bahwa Roberto Cingolani, kepala perusahaan kontraktor pertahanan Leonardo yang berbasis di Roma, turut termasuk dalam aduan tersebut.

Aduan yang diajukan pada 1 Oktober itu ditandatangani sekitar 50 orang, termasuk profesor hukum, pengacara, dan sejumlah tokoh masyarakat.

"Dengan mendukung pemerintah Israel, terutama melalui penyediaan senjata mematikan, pemerintah Italia telah terlibat dalam genosida yang sedang berlangsung dan kejahatan perang yang sangat serius serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina," demikian bunyi aduan ke ICC tersebut.

"Saya pikir tidak ada kasus lainnya di dunia atau dalam sejarah yang memiliki aduan seperti ini," ucap Meloni dalam komentarnya.

Para penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh Israel melakukan tindakan genosida di Jalur Gaza, wilayah yang telah menjadi medan konflik antara militer Tel Aviv dan kelompok Hamas selama dua tahun terakhir.

Sementara itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, serta mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant.

Keduanya didakwa atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait operasi militer Israel di Jalur Gaza, termasuk kelaparan, pembunuhan, dan penganiayaan.

Meski begitu, ICC belum menuntut keduanya dengan dakwaan genosida. Kelompok advokasi Palestina yang mengadukan Meloni meminta ICC mempertimbangkan kemungkinan membuka penyelidikan resmi terkait tuduhan tersebut.

Selain proses di ICC, Israel juga menghadapi gugatan dari Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ), yang menuduh Tel Aviv melanggar Konvensi Genosida PBB 1948. (AFP, ist/nei)

Timeline Negosiasi Damai Gaza – Oktober 2025

- **September 2025:** Trump ajukan rencana perdamaian 20 poin untuk gencatan senjata dan solusi kemanusiaan.
- **6 Oktober:** Pertemuan di Sharm El-Sheikh, negosiator Israel–Hamas bertemu tidak langsung.
- **7 Oktober:** Bahas kerangka kesepakatan dan jalur komunikasi; AS beri masukan mediasi.
- **8 Oktober:** AS, Qatar, dan Turki bergabung (Witkoff, Kushner, Al Thani, Kalin hadir).
- **Fokus:** Perlindungan serta pembebasan sandera; AS jamin kepatuhan kesepakatan.
- **Dukungan global:** PBB laporkan krisis kemanusiaan; demonstrasi dorong akhir perang.
- **Tahap lanjut:** Implementasi gencatan senjata dan bantuan, lanjut ke solusi politik jangka panjang.

AS, Qatar, dan Turki Ikut Negosiasi Damai di Mesir

AMERIKA Serikat, Qatar, dan Turki dijadwalkan ikut serta pada hari ketiga perundingan damai Gaza yang digelar di Mesir, Rabu (8/10/2025). Pertemuan di resor Sharm El-Sheikh ini menghadirkan negosiator Israel dan Hamas dalam dialog secara tidak langsung.

Menurut laporan CNA, diskusi tersebut mengacu pada rencana 20 poin yang diajukan Presiden AS Donald Trump bulan lalu. Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, serta Kepala Intelijen Turki, Ibrahim Kalin, turut dijadwalkan hadir.

Mereka akan bergabung dengan Utusan Khusus Timur Tengah AS, Steve Witkoff, serta penasihat sekaligus menantu Presiden Trump, Jared Kushner. Trump menyampaikan kepada wartawan bahwa terdapat "peluang nyata" untuk mencapai kemajuan dalam perundingan.

Ia menegaskan keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam proses negosiasi tersebut. "Ada peluang nyata bahwa kita bisa mencapai sesuatu," ujar Trump kepada wartawan di Kantor Oval, Selasa (7/10/2025).

Ia menyatakan bahwa peluang tercapainya perdamaian di Timur Tengah kini lebih besar dibanding sebelumnya. Trump juga menekankan bahwa keselamatan para sandera menjadi prioritas utama.

Selain itu, Trump berjanji bahwa Amerika Serikat akan memastikan semua pihak mematuhi kesepakatan jika Hamas dan Israel berhasil mencapai gencatan senjata. Tekanan dari komunitas internasional untuk menghentikan konflik terus meningkat di berbagai negara.

PBB melaporkan bahwa sebagian besar wilayah Gaza mengalami kerusakan parah, dan kondisi kemanusiaan memburuk hingga mencapai tingkat kelaparan massal. Akhir pekan lalu, ratusan ribu orang menggelar aksi protes di berbagai kota di dunia, termasuk di Italia, Spanyol, Irlandia, Inggris, dan Belanda.

Para demonstran menuntut berakhirnya perang dan menyerukan pengakuan terhadap negara Palestina. Di Inggris, puluhan ribu peserta tetap turun ke jalan meski Perdana Menteri Keir Starmer mengimbau warga untuk tidak ikut dalam aksi tersebut. (CNA, ist/nei)

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan

Terapkan 20-20-20 untuk Kesehatan Mata Sejak Dini

Menjaga kesehatan mata merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga. Penglihatan yang baik memungkinkan seseorang menikmati setiap momen kehidupan dengan lebih jelas dan penuh warna. Namun, gaya hidup modern sering kali membuat mata bekerja lebih keras, sehingga meningkatkan risiko gangguan penglihatan.

Banyak orang bertanya-tanya, adakah cara efektif untuk menunda atau bahkan mencegah penggunaan kacamata? Jawabannya adalah ada, yakni melalui kombinasi gaya hidup sehat dan kebiasaan perawatan mata yang konsisten. Upaya pencegahan kebutuhan kacamata dapat dilakukan dengan langkah-langkah proaktif yang dimulai sejak dini.

Artikel ini akan membahas berbagai cara untuk mencegah penggunaan kacamata yang dapat diterapkan dalam rutinitas harian. Mulai dari pola makan bergizi hingga perlindungan mata yang tepat, semua langkah ini dapat membantu menjaga kesehatan mata agar tetap optimal.

Nutrisi Optimal

Pola makan yang sehat dan seimbang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mata. Asupan nutrisi yang tepat dapat membantu mencegah berbagai gangguan penglihatan, termasuk degenerasi makula dan katarak yang umumnya berkaitan dengan proses penuaan. Mengonsumsi makanan yang kaya antioksidan dan vitamin merupakan langkah utama dalam menjaga fungsi penglihatan.

Nutrisi penting seperti asam lemak omega-3, lutein, zeaxanthin, seng, serta vitamin A, C, dan E berperan besar dalam melindungi sel-sel mata dari kerusakan sekaligus mendukung fungsi penglihatan agar tetap optimal. Oleh karena itu, menu harian sebaiknya mencakup berbagai sumber nutrisi tersebut.

Selain asupan makanan, menjaga kecukupan cairan tubuh juga sangat penting. Mengonsumsi air dalam jumlah yang memadai membantu menjaga kelembapan mata, meningkatkan kenyamanan, serta mendukung produksi air mata yang berperan dalam menjaga kejernihan dan kesehatan penglihatan.

Kurangi Ketegangan Mata Digital

Pada era digital saat ini, mata sering terpapar layar gawai dalam waktu yang lama, sehingga memicu ketegangan mata digital atau sindrom penglihatan komputer. Kondisi tersebut, apabila tidak ditangani dengan baik, dapat memperburuk miopia atau rabun jauh. Oleh sebab itu, penting untuk menerapkan langkah-langkah efektif dalam mengurangi beban kerja mata.

Salah satu cara yang paling dikenal untuk mencegah ketergantungan pada kacamata adalah dengan menerapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki (sekitar 6 meter) selama 20 detik. Aturan sederhana ini sangat membantu mengistirahatkan otot mata dan mengurangi ketegangan secara signifikan.

Selain paparan layar digital, aktivitas jarak dekat seperti membaca buku atau melakukan pekerjaan detail juga dapat menyebabkan kelelahan mata. Oleh karena itu, penting untuk mengambil jeda secara berkala dari aktivitas tersebut. Selain itu, sesuaikan tingkat kecerahan layar dengan pencahayaan ruangan dan pertimbangkan penggunaan kacamata anti-silau apabila diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan penglihatan.

Perlindungan Mata

Melindungi mata dari faktor eksternal serta menjaga gaya hidup sehat merupakan dua hal penting dalam upaya mencegah ketergantungan pada kacamata. Paparan sinar ultraviolet (UV) yang berlebihan dapat merusak jaringan mata dan meningkatkan risiko terjadinya katarak, kanker mata, serta pertumbuhan jaringan abnormal. Oleh karena itu, disarankan untuk selalu mengenakan kacamata hitam yang mampu memblokir 99% hingga 100% radiasi UVA dan UVB ketika beraktivitas di luar ruangan, bahkan saat cuaca mendung.

Selain itu, cedera mata dapat terjadi kapan saja, sehingga penting untuk menggunakan kacamata pelindung saat melakukan aktivitas berisiko seperti berkebun, berolahraga, atau melakukan pekerjaan rumah yang melibatkan bahan kimia.

Menjaga kebersihan mata juga sangat penting; pastikan tangan dalam keadaan bersih sebelum menyentuh area mata, terutama bagi pengguna lensa kontak, guna mencegah infeksi. Hindari pula kebiasaan menggosok mata secara berlebihan karena dapat menimbulkan iritasi atau cedera ringan.

Penerapan gaya hidup aktif dan sehat turut berperan dalam menjaga kesehatan mata secara menyeluruh. Berolahraga secara teratur dapat membantu mencegah berbagai penyakit mata, seperti degenerasi makula, glaukoma, dan retinopati diabetik.

Selain itu, menjaga berat badan ideal, berhenti merokok, serta mengelola kondisi kesehatan kronis seperti diabetes dan tekanan darah tinggi sangat penting untuk mempertahankan fungsi penglihatan yang optimal.

Pentingnya di Luar Ruangan

Menghabiskan waktu di luar ruangan, terutama di bawah cahaya alami, terbukti dapat membantu mengurangi risiko miopia, khususnya pada anak-anak dan dewasa muda. Lingkungan luar ruangan yang bervariasi mendorong mata untuk berfokus pada jarak yang berbeda-beda, sehingga memberikan waktu istirahat dari aktivitas fokus jarak dekat yang sering dilakukan di dalam ruangan. Langkah ini merupakan cara sederhana sekaligus menyenangkan untuk membantu menjaga kesehatan mata dan mencegah ketergantungan pada kacamata.(nei,ist/dya)

Sumber Makanan Terbaik

Sayuran berdaun hijau gelap:

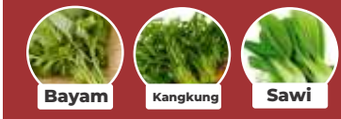

Ikan berlemak tinggi omega-3:

Buah-buahan berwarna-warni:

China Ciptakan Wajah Robot AI Mirip Manusia

Sebuah perusahaan teknologi asal China mencuri perhatian publik setelah merilis video yang menampilkan kepala robot dengan ekspresi yang tampak sangat realistis—mampu berkedip, mengangguk, dan menatap ke sekeliling layaknya manusia sungguhan.

Dalam video yang diunggah ke YouTube, robot tersebut terlihat menunjukkan ekspresi penasaran, seakan sedang mengamati lingkungan di sekitarnya. Kepala robot itu dikembangkan oleh perusahaan robotika AheadForm, yang merancangnya untuk keperluan penelitian interaksi manusia dan robot, serta penerapan di berbagai sektor seperti layanan pelanggan hingga industri hiburan.

Didirikan pada tahun 2024, AheadForm memiliki visi untuk menghadirkan interaksi yang lebih alami dan menarik antara manusia dan robot. Melalui situs resminya, perusahaan tersebut menjelaskan bahwa mereka berfokus pada integrasi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), termasuk model bahasa besar (large language models/LLM), ke dalam kepala robot berwajah realistis agar mampu memahami serta merespons manusia secara langsung.

"Fokus kami saat ini adalah menciptakan kepala robot humanoid canggih yang mampu mengekspresikan emosi, memahami lingkungan, dan berinteraksi dengan manusia secara mulus," tulis AheadForm di situs resminya.

Hingga saat ini, AheadForm telah merilis seju mlah seri robot dengan desain dan fungsi yang beragam. Beberapa di antaranya adalah seri "Elf", yang memiliki telinga lancip dan dilengkapi sistem kontrol presisi tinggi, serta "Lan Series", yang dirancang lebih menyerupai manusia dengan fokus pada efisiensi biaya dan pergerakan yang lebih alami.

Dengan pengembangan kepala robot yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan (AI), AheadForm menargetkan terciptanya robot yang lebih mudah dipahami dan mampu berinteraksi secara lebih dekat dengan manusia.Pendekatan ini dinilai penting terutama untuk sektor seperti layanan pelanggan, pendidikan, dan kesehatan, di mana kepercayaan dan hubungan emosional antara robot dan manusia sangat dibutuhkan.

Para peneliti di AheadForm kini tengah menguji bagaimana konsep ini dapat diterapkan secara nyata. Dalam sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal Science Robotics tahun 2024, pendiri AheadForm Yuhang Hu bersama timnya menciptakan robot yang dapat menganalisis, memprediksi, dan meniru ekspresi wajah manusia secara real-time.

Untuk mencapai gerakan halus dan realistis seperti dalam video, AheadForm menggunakan brushless motor, perangkat kecil yang bekerja senyap namun presisi, menghasilkan kedipan, gerakan mata, dan ekspresi mikro yang membuat wajah robot terlihat hidup.

Model terbaru mereka, Origin M1, merupakan hasil pengembangan teknologi robotika yang sangat maju dan detail.

Kepala robot ini dilengkapi hingga 25 motor kecil presisi tinggi yang bekerja secara sinkron untuk mengontrol setiap gerakan halus pada wajah — mulai dari senyum, kedipan mata, hingga perubahan ekspresi seperti terkejut, sedih, atau bahagia.

Setiap motor diprogram untuk meniru otot wajah manusia dengan tingkat akurasi yang luar biasa, menjadikan ekspresi yang dihasilkan terlihat begitu realistis.

Di bagian mata, Origin M1 dibekali kamera mikro beresolusi tinggi yang tertanam di pupilnya. Kamera ini berfungsi sebagai "mata" robot, memungkinkan sistem pengenalan visualnya untuk mendeteksi wajah, membaca emosi manusia, serta mengenali objek di sekitarnya.

Sementara itu, speaker dan mikrofon internal memungkinkan robot untuk berkomunikasi secara dua arah — tidak hanya menjawab perintah, tetapi juga merespons percakapan dengan intonasi dan ekspresi wajah yang sesuai dengan konteks pembicaraan.

Meskipun telah menarik banyak perhatian dari peneliti, investor, hingga penggemar teknologi di seluruh dunia, kepala robot ini belum dijual secara komersial. Proyek ini masih berada pada tahap pengujian lanjutan untuk menyempurnakan sistem (nei,ist/dya)

HARIAN LENTERA Inspirasi Perubahan TODAY

HARIAN **"LENTERA TODAY"**
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021

MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO **I GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) **I MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH **I LAMONGAN:** L HANDI **I BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA **I KEDIRI:** GATOT SUNARKO **I JOMBANG :** SUTONO **I PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO **I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO **I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN **I TRENGGALEK:** TINA W **I NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO **I DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN **I LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN **I PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH **I MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN **I SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN **I ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 **I TELP** 03187854491 **I PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA **I ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA **I TELP IKLAN** 031-87854491 **I NIB** 912050068011134 **I HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan

Cara Cerdas Agar Gaji Tak Numpang Lewat

Hari gajian merupakan momen yang paling dinanti oleh para karyawan. Setelah berhari-hari menunggu, dompet yang mulai menipis akhirnya kembali terisi. Beragam rencana belanja yang sebelumnya tertunda pun dapat terlaksana. Namun, perlu diingat bahwa tanpa perencanaan keuangan yang matang, gaji yang baru diterima bisa cepat habis tanpa disadari.

Sebaliknya, dengan pengelolaan keuangan yang bijak, gaji bulanan dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sejahtera di masa depan. Mengatur pengeluaran, menabung secara konsisten, serta menyisihkan dana untuk investasi merupakan kebiasaan penting agar keuangan tetap sehat dan stabil.

Cek Laporan Keuangan

Luangkan waktu secara rutin untuk memeriksa laporan keuangan pribadi. Meskipun terasa menakutkan bagi sebagian orang, kebiasaan ini merupakan langkah penting untuk memahami kondisi finansial secara menyeluruh. Dengan mengetahui alur keluar masuk uang, seseorang dapat lebih mudah mengidentifikasi area pengeluaran yang perlu dikendalikan. Selain itu, memeriksa laporan keuangan membantu mengenali pola kebiasaan dalam menggunakan uang. Dari sana, dapat terlihat mana pengeluaran yang benar-benar penting dan mana yang bersifat impulsif atau tidak perlu. Dengan evaluasi yang konsisten, pengelolaan keuangan dapat menjadi lebih terarah dan efisien.

Ketahui Kebutuhan Pokok dan Non-esensial

Ada beberapa kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindari atau dikurangi, seperti pembayaran tagihan listrik, biaya sewa tempat tinggal, belanja bahan makanan, biaya transportasi, serta langganan layanan tertentu. Kebutuhan tersebut termasuk dalam pengeluaran prioritas yang harus dipenuhi terlebih dahulu setiap kali menerima gaji. Dengan memastikannya terpenuhi, kestabilan keuangan bulanan dapat tetap terjaga.Di sisi lain, terdapat pula jenis pengeluaran yang bersifat tidak mendesak, seperti belanja barang konsumtif, makan di luar, atau kegiatan rekreasi.

Rumus Mengatur Keuangan

Prinsip utama dalam mengelola keuangan adalah menabung terlebih dahulu, berbelanja kemudian. Anggap tabungan sebagai pengeluaran wajib, layaknya memb

ayar cicilan atau tagihan yang tidak dapat dihindari. Dengan menempatkan menabung sebagai prioritas, seseorang dapat membangun kebiasaan finansial yang sehat dan lebih siap menghadapi kebutuhan mendadak di masa depan.

Setelah menyisihkan dana untuk tabungan, langkah selanjutnya adalah merencanakan serta memprioritaskan pengeluaran lainnya. Pengelolaan dana yang efektif dapat mengikuti rumus 50:30:20, yaitu 50 persen dari gaji digunakan untuk kebutuhan pokok, 30 persen untuk pengeluaran gaya hidup, dan 20 persen untuk tabungan atau investasi.

Buat Jaring Pengaman

Sebelum memutuskan untuk berbelanja atau berinvestasi, penting untuk terlebih dahulu membangun dana darurat. Dana ini berfungsi sebagai cadangan keuangan yang dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan pokok selama tiga hingga enam bulan apabila terjadi situasi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau kondisi darurat lainnya. Memiliki dana darurat adalah langkah wajib dalam menjaga kestabilan finansial.

Sebaiknya, pisahkan dana darurat ke dalam rekening khusus agar tidak tercampur dengan uang sehari-hari. Pilihan tempat penyimpanan yang tepat antara lain rekening tabungan berbunga tinggi, deposito berjangka pendek, atau reksa dana likuid.

Lunasi Utang Berbunga Tinggi

Dengan fluktuasi suku bunga yang tidak menentu, utang kartu kredit dan pinjaman pribadi dapat menjadi beban finansial yang berat dan menghambat seseorang untuk mencapai kestabilan ekonomi. Bunga yang terus bertambah akan membuat jumlah cicilan semakin besar, sehingga sulit bagi keuangan untuk berkembang. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa pengelolaan utang merupakan langkah awal menuju kebebasan finansial.Sebaiknya, jadikan pelunasan utang sebagai prioritas utama setiap kali menerima gaji. Lunasi terlebih dahulu tagihan kartu kredit atau pinjaman pribadi sebelum mengalokasikan dana untuk kebutuhan lainnya, termasuk belanja.

Tolak Jebakan Media Sosial

Ketika menggunakan media sosial, penting untuk memiliki kendali diri yang kuat agar tidak mudah tergoda oleh berbagai iklan belanja yang bermunculan. Platform digital kini dipenuhi dengan promosi dan penawaran menarik yang sering kali didesain untuk menciptakan rasa urgensi, seperti diskon terbatas atau promosi waktu singkat. Tanpa disadari, hal ini dapat mendorong seseorang melakukan pembelian impulsif yang sebenarnya tidak diperlukan.Sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau hanya keinginan sesaat.

Ubah Gaya Hidup

Pengeluaran sehari-hari dapat dikendalikan melalui berbagai cara sederhana, seperti menghemat penggunaan listrik di rumah, mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan, serta memilih untuk memasak sendiri daripada memesan makanan antar. Langkah-langkah kecil seperti ini dapat memberikan pengaruh besar terhadap pengelolaan keuangan bulanan, sekaligus membantu membentuk kebiasaan hidup hemat.

(nei,ist/dya)

Menkeu Bakal Kucurkan ...dari hal 1

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak pemerintah Jawa Barat dan Jawa Timur. "Jadi, kita lagi diskusi dengan mereka. Mereka bisa terima berapa sih. Kalau waktu bank BUMN kan saya paksa. Saya takut juga banknya enggak sebesar BUMN kan, enggak sebesar Himbara," kata Purbaya saat ditemui di kawasan Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Sebelum menentukan besaran penempatan dana, Purbaya telah mengutus bawahannya untuk berdiskusi dengan direksi kedua bank daerah itu tentang kesiapan besaran dana yang bisa ditempatkan dan dikelola.

Bila dari hasil diskusi jajaran direksi Bank Jakarta dan Bank Jatim tak mampu mengelola penempatan dana menganggur pemerintah, Purbaya tak akan memaksa mereka untuk menampung dananya.

Purbaya mengatakan, saat ini pemerintah juga masih memiliki dana yang 'menganggur' di Bank Indonesia dengan nilai mencapai sekitar Rp275 triliun. "Hal yang saya punya di bank sentral itu masih ada Rp270-an triliun, cash. Jadi uang saya cukup banyak," ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Purbaya juga mengaku tak khawatir jika ke depan anggaran itu akan kembali digunakan untuk menambah likuiditas perbankan, yang diharapkan juga dapat diputar kembali dalam bentuk kredit ke sektor riil.

Dia lantas mengestimasikan jika dana cadangan pemerintah di Bank Sentral tersebut. masih cukup memadai. Setidaknya, sebanyak Rp100 triliun di antaranya masih bisa digunakan untuk menambah likuiditas ke perbankan.

"Kalau saya ciptakan utang jangka pendek, misal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, maksudnya saya nggak perlu level aman. Karena saya bisa keluarkan di situ dengan cepat. Kita keluarkan Rp100 triliun [untuk tambahan], sebulan cukup," tutur dia.

Terkait dengan nilai, Angka spesifik likuiditas Rp5 triliun - Rp10 triliun per bank. Kalau 2 (bank) kan 5 x 2 itu 10. Kalau 10 x 2 itu Rp20 triliun," sebut Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025) kemarin.

Purbaya mengaku tak khawatir likuiditas dari pemerintah pusat 'menganggur' di bank daerah. Pasalnya, ada permintaan yang kuat di kedua bank tersebut. "Kan DKI kan kuat uangnya. Jadi saya tidak takut. Jawa Timur juga kuat. Saya lihat yang ada permintaan [kuat] dan punya kemampuan mereka," jelas Purbaya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo dan Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo sama-sama menyambut baik keputusan tersebut, dan kompak menyatakan akan menyalurkan ke sektor produktif. Selain itu, keduanya mengungkapkan likuiditas kedua BPD tersebut sama-sama dalam kondisi terjaga.

Berdasarkan laporan keuangan semester I-2025 kedua bank itu masing-masing mencatatkan rasio pinjaman terhadapo simpanan di posisi longgar. Loan to deposito ratio (LDR) Bank Jatim dan Bank Jakarta masing-masing sebesar 85,00% dan 78,15%. Adapun batas LDR dari Bank Indonesia (BI), yakni 78%-92%.

Pada fungsi intermediasi, Bank Jatim menyalurkan Rp67,31 triliun atau naik 15,91% secara tahunan atau year on year (yoy) pada semester I-2025. Pada periode yang sama penyaluran kredit Bank Jakarta koreksi 1,23% menjadi Rp52,90 triliun.

Sementara itu, total aset Bank Jatim sebesar Rp118,14 triliun, sedangkan Bank Jakarta sebesar Rp84,72 triliun per Juni 2025. Maka demikian, kucuran dana sebesar Rp10 triliun hingga Rp20 triliun dari Kementerian Keuangan sebesar 8%-17% bagi Bank Jatim, dan sebesar 12%-24% bagi Bank Jakarta.

Kucuran dana itu sama besar atau melebihi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) yang asetnya mencapai Rp400 triliun per Juni. Bank syariah terbesar di Indonesia itu mendapatkan Rp10 triliun dari Kemenkeu.

Menurut Advisor Banking and Finance Development Centre (BFDC) Amin Nurdin kebijakan Purbaya diambil sebagai bantuan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah Jawa Timur. Terlebih, Bank Jatim dapat menyasar UMKM dan sektor riil di wilayahnya.

Untuk Bank Jakarta, Amin mengatakan Purbaya mungkin memandang bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki banyak rencana ke depan yang perlu dukungan dari Bank Jakarta.

"Meskipun bisa saja Pemprov DKI menggunakan fasilitas dari bank-bank Himbara lain untuk hal tersebut, tapi akan lebih baik, jika mengandalkan bank sendiri," kata Amin dilansir CNBC Indonesia, Rabu (8/10/2025).

Ia menambahkan, kucuran dana ini juga bisa meningkatkan aset kedua bank daerah tersebut. Jika aset produktif yang dihasilkan berkualitas, Amin mengatakan itu akan memicu pertumbuhan pendapatan yang pada akhirnya bisa dijadikan laba ditahan, dan kemudian bisa meingkatkan modal perusahaan.

Sementara itu, pengamat perbankan Paul Sutaryono menilai tidak ada ukuran yang valid seberapa besar kucuran dana segar ke bank, baik bank pemerintah maupun BPD. Namun, ia menyorot masalah bagi industri perbankan bukan terletak pada likuiditas, melainkan pada kredit yang sudah disetujui tapi belum ditarik (undisbursed loan) yang malah meningkat.

"Artinya, likuiditas perbankan atau sisi penawaran (supply side) ternyata melimpah ruah. Jadi masalahnya ada di sisi permintaan (demand side) saat ini yakni permintaan kredit yang lemah," terang Paul kepada CNBC Indonesia, Rabu (8/10/2025).

Oleh karena itu, ia mengatakan risikonya adalah tantangan bagi BPD untuk mampu menaikkan penyaluran kredit, setelah menerima dana segar yang besar itu.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Gigih Prihantono mengatakan Purbaya terlalu banyak menelurkan kebijakan di bidang moneter, daripada di bidang fiskal.

Dia menjelaskan kebijakan Menteri Purbaya untuk menyuntikkan dana likuiditas senilai triliun rupiah ke bank-bank Himbara serta rencana penyaluran dana tersebut kepada bank pembangunan daerah (BPD), termasuk Bank DKI dan Bank Jatim, tidak akan menyebabkan suku bunga menurun.

"Kebijakan ini tidak efektif karena penambahan uang, money supply, itu bukan penyebab menurunnya suku bunga. Kalau money demand-nya enggak ada, ya enggak bisa turun suku bunganya, dan pengusaha atau dunia industri itu enggak peduli kamu punya duit berapa. Yang penting ketika kita pinjam itu suku bunganya berapa? Bisa tidak sampai 2%, misalnya?" ucap Gigih saat dihubungi Bisnis, Selasa (7/10/2025) dilansir bisnis.

Dirinya pun menyatakan, kebijakan Menteri Purbaya untuk menyuntikkan dana dari BI kepada bank-bank Himbara dan BPD tersebut juga tidak akan berpengaruh banyak dan mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Gigih pun berpendapat bahwa sebaiknya Menteri Purbaya saat ini dapat lebih fokus untuk berkecimpung dalam kebijakan fiskal ketimbang mengurusi kebijakan moneter. Dia menyebut, transfer pusat ke daerah (TKD) tidak seharusnya dipotong karena akan berdampak banyak pada daya beli masyarakat.

Gigih pun menegaskan, daripada dana likuiditas milik pemerintah senilai triliunan rupiah itu mengendap di bank, lebih baik nominal dana transfer ke pemerintah daerah yang sempat dipotong beberapa waktu lalu, dikembalikan seperti sedia kala.

Hal tersebut dapat dilakukan supaya belanja dari pemerintah daerah dapat berjalan seperti normal dan dapat berefek cepat dalam menggerakkan kembali roda perekonomian daerah.

Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance alias Indef mewanti-wanti Purbaya untuk menyiapkan strategi penyaluran kredit sebelum menempatkan dana pemerintah ke Bank Jakarta dan Bank Jatim.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menjelaskan bahwa likuiditas BPD saat ini sebenarnya masih longgar, dengan rasio loan to deposit ratio (LDR) sekitar 83,3%. Di sisi lain, dana pemerintah daerah yang mengendap di bank mencapai Rp233 triliun, tertinggi dalam lima tahun terakhir.

"Artinya, masalah utama BPD bukan kekurangan dana, melainkan rendahnya penyaluran kredit produktif yang hanya tumbuh 3,8% per Juni 2025," ujarnya dilansir Bisnis, Selasa (7/10/2025).

Menurut Rizal, penempatan dana pemerintah memang akan menambah kas nominal BPD. Hanya saja, kebijakan tersebut justru dapat meningkatkan beban bunga bank tanpa strategi intermediasi yang kuat.

Menurutnya, jika tak ada mekanisme penyaluran bersyarat maka kebijakan itu hanya memindahkan dana menganggur dari kas pusat ke kas daerah tanpa efek ganda terhadap ekonomi riil.

Pengajar di Universitas Trilogi Jakarta ini mendorong agar penempatan dana dikaitkan dengan kinerja penyaluran kredit. Dia mencontohkan, otoritas fiskal bisa mengatur skema conditional placement, yang mana BPD wajib menyalurkan dana ke sektor produktif seperti UMKM, pertanian, dan infrastruktur daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dengan asumsi credit-output elasticity sekitar 0,25, Rizal memperkirakan setiap Rp10 triliun dana yang benar-benar tersalurkan bisa menambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp2,5 triliun atau setara 0,1–0,2%. "Namun bila hanya mengendap, dampaknya nyaris nol terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.

Lebih jauh, Rizal menyarankan agar pemerintah menjadikan penempatan dana ini sebagai katalis untuk memperluas portofolio kredit produktif BPD yang selama ini masih didominasi oleh kredit konsumtif aparatur sipil negara (ASN).

Selain itu, dia mengusulkan pengintegrasian dana pemerintah daerah yang mengendap melalui dana regional terhimpun (pooled regional fund) guna meningkatkan efisiensi dan penggandaan fiskal.

"Tanpa desain berbasis kinerja, kebijakan ini hanya akan mempertebal likuiditas pasif, menekan margin bank daerah, dan gagal menjadi instrumen pengungkit ekonomi daerah yang berkelanjutan," tutupnya.

Berdasarkan Laporan Statistik Perbankan Indonesia Juni 2025 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPD mencatatkan total laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan sebesar Rp7,13 triliun pada semester I/2025. Angka itu tumbuh 4,61% secara tahunan (year on year/YoY) dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp6,81 triliun. (han,ist,ant/lut)

HARIAN LENTERA
Inspirasi Peruba

DPRD dan Pemkot Surabaya Sepakati Nota Kesepahaman RAPBD 2026 Senilai Rp12,6 Triliun,

Bahtiar Rifai: Program Prorakyat Tetap Jadi Prioritas Meski Ada Pemotongan TKD

SURABAYA — DPRD Kota Surabaya bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi menandatangani nota kesepahaman terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna di lantai 3 Gedung DPRD Surabaya, Selasa (7/10/2025).

Dalam nota kesepahaman tersebut, disepakati bahwa nilai RAPBD 2026 berada di angka Rp12,6 triliun. Selain itu, RAPBD 2026 juga tetap memprioritaskan dan menjamin program-program prorakyat tetap berjalan.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono, dan dihadiri oleh tiga Wakil Ketua DPRD Arif Fathoni, Bahtiyar Rifai, Laila Mufidah, serta anggota DPRD Surabaya lainnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiar Rifai, menjelaskan, hasil kesepakatan ini akan menjadi dasar pembahasan di tingkat komisi-komisi DPRD dalam jangka waktu sekitar tiga hingga empat minggu ke depan.

"Rencananya, RAPBD 2026 akan kita paripurnakan untuk pengesahan pada tanggal 10 November mendatang," kata Bahtiyar pada Lentera, Rabu (8/10/2025).

Ia mengatakan meski Pemkot Surabaya menghadapi tantangan berupa pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memastikan bahwa berbagai program pro-rakyat tetap berjalan. Seperti program sosial, kepemudaan, dan beasiswa yang akan tetap dipertahankan tanpa pengurangan anggaran.

"Pemkot sudah meyakinkan kami bahwa program-program rutin, terutama yang bersifat sosial dan pendidikan, tidak akan terganggu. Meskipun ada tekanan fiskal, Pemkot tetap menjaga keberlanjutan program prioritas tersebut," tegasnya.

Terkait dengan skema pembiayaan alternatif yang digunakan Pemkot, Bahtiar mengakui bahwa langkah tersebut sempat menimbulkan perdebatan. Namun, setelah dilakukan konsultasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas, DPRD memastikan tidak ada masalah hukum atau administratif yang menghambat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kiri) bersama empat pimpinan DPRD Kota Surabaya resmi menandatangani nota kesepahaman terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

"Surabaya bukan satu-satunya daerah yang menggunakan pembiayaan alternatif. Kabupaten Lamongan, Banyuwangi, bahkan DKI Jakarta juga melakukannya. Kami mendorong Pemkot untuk bekerja sama dengan PT SMI dan Bank Jatim karena lebih fleksibel terkait bunga dan tenor," jelas Bahtiar.

Ia menambahkan, DPRD akan tetap melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan pembiayaan tersebut. "Bagaimanapun, ini adalah pertaruhan besar bagi Wali Kota Surabaya. Semangatnya untuk membangun kota harus tetap selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah," katanya.

Politisi dari Fraksi Gerindra ini berharap agar seluruh program yang tertuang dalam RAPBD benar-benar merepresentasikan aspirasi masyarakat. Menurutnya, usulan program berasal dari berbagai sumber, mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan, hingga pokok-pokok pikiran (pokir) hasil reses anggota dewan.

"Harapan kami, setiap usulan masyarakat bisa direalisasikan dengan melihat asas kehati-hatian, kemanfaatan, dan kesinambungan. Program jangan sampai bersifat parsial, tapi harus berkelanjutan agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh warga Surabaya," pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama pemkot Surabaya, meskipun menghadapi tantangan berupa pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

"Pertumbuhan ekonomi Surabaya tidak boleh mundur meski transfer daerah berkurang. Dibutuhkan keberanian, keteguhan, dan kekuatan kebersamaan antara eksekutif dan legislatif agar roda ekonomi tetap bergerak," kata Eri.

Dalam paparannya, Eri mengungkapkan arah kebijakan R-APBD 2026 akan tetap berorientasi pada kesejahteraan warga, terutama melalui program-program sosial dan pendidikan.

Beberapa program strategis yang akan dilanjutkan antara lain Satu Keluarga Satu Sarjana, bantuan operasional pendidikan untuk sekolah swasta, serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

"Kami akan memberikan bantuan operasional tambahan sebesar Rp350.000 per bulan kepada sekolah swasta setingkat SMA dan SMK di Surabaya. Harapannya, tidak ada lagi ijazah siswa dari keluarga kurang mampu yang ditahan," jelasnya.

Terkait program Rutilahu, Pemkot bersama Komisi A DPRD Surabaya tengah mematangkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) Rumah Layak Huni agar penerima bantuan lebih tepat sasaran.

"Perda ini diharapkan mampu membatasi dan menyeleksi siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan, supaya pengentasan kemiskinan bisa lebih terukur," tuturnya.

Eri juga mengakui bahwa kekuatan fiskal Kota Surabaya menjadi tantangan tersendiri. Meski pendapatan asli daerah meningkat, pengurangan transfer pusat justru membuat bantuan keuangan dari pemerintah pusat berkurang.

"Surabaya dijadikan contoh. Ketika fiskalnya kuat, transfernya turun, bantuannya juga turun. Di sinilah dibutuhkan inovasi agar kemiskinan tetap menurun meski dana pusat berkurang," ujarnya.

Untuk itu, Pemkot akan mengedepankan inovasi pembiayaan dan efisiensi belanja daerah, sembari menjaga agar program pro-rakyat tidak terganggu.

Tak hanya itu, dalam rancangan APBD 2026, Pemkot Surabaya menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kematian ibu dan anak.

"Dengan kolaborasi yang kuat, kami yakin seluruh program pro-rakyat dapat tetap berjalan, sementara pembangunan infrastruktur kota juga terus berlanjut," tutup Eri. (adv,am/lut)

Harapan kami, setiap usulan masyarakat bisa direalisasikan dengan melihat asas kehati-hatian, kemanfaatan, dan kesinambungan. Program jangan sampai bersifat parsial, tapi harus berkelanjutan agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh warga Surabaya,"

BAHTIAR RIFAI
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya